



# PT JAMKRIDA JABAR

**PT JAMKRIDA JABAR  
LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL  
31 DESEMBER 2018 DAN 2017  
DISERTAI  
LAPORAN AUDIT INDEPENDEN**

terdaftar dan diawasi oleh :



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

## Daftar Isi

### Halaman

#### **Surat Pernyataan Direksi**

#### **Laporan Auditor Independen**

i-ii

#### **Laporan Keuangan**

Laporan Posisi Keuangan

1

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

2

Laporan Perubahan Ekuitas

3

Laporan Arus Kas

4

Catatan Atas Laporan Keuangan

5-35







**PT JAMKRIDA JABAR**

Jl. Soekarno Hatta No. 592 Bandung  
Telp. (022) 7504777, 7506307  
Fax. (022) 7563333  
E-mail : info@jamkrida-jabar.co.id  
Website : www.jamkrida-jabar.co.id

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PT JAMKRIDA JABAR  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2018**

---

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Budhi Muljawan  
Alamat kantor : Jl. Soekarno Hatta No 592 - Bandung  
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Budi Setyono  
Alamat kantor : Jl. Soekarno Hatta No 592 - Bandung  
Jabatan : Direktur Utama

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Jamkrida Jabar tahun buku 2018.
2. Laporan Keuangan PT Jamkrida Jabar sebagaimana dimaksud butir 1 diatas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan PT Jamkrida Jabar tahun buku 2018 telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan Keuangan PT Jamkrida Jabar tahun buku 2018 tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Jamkrida Jabar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandung, 4 April 2019

**PT JAMKRIDA JABAR**



**Tri Budhi Muljawan**  
Direktur Utama

**Budi Setyono**  
Direktur Keuangan



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK**  
**Drs. BAMBANG SUDARYONO & REKAN**  
**REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS**  
Izin Usaha : KEP-184/KM.17/1999

Nomor: 00064/2.0326/AU.1/09/0411-1/1/IV/2019

**Laporan Auditor Independen**

Kepada Yth.  
**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi**  
**PT Jamkrida Jabar**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jamkrida Jabar yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan perusahaan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



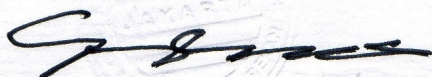
## **Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jamkrida Jabar tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

## **Hal Lain**

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik lain dengan Laporan No: LAI/GA/SPD/18019 tanggal 12 Maret 2018 dengan opini wajar tanpa pengecualian.

**KAP Drs. Bambang Sudaryono & Rekan**



**Drs. Sudarmadji Herry Sutrisno, Ak., MM., CPA., CA.**  
Surat Izin Akuntan Publik No: AP. 0411

04 April 2019

**PT JAMKRIDA JABAR**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

	<b>Catatan</b>	<b>31 Desember 2018</b>	<b>31 Desember 2017</b>
<b>ASET</b>			
Kas dan Setara Kas	2a, 3	139.780.660.474	160.417.542.006
Piutang Re/Cogaransi	2e, 4	8.000.292.199	2.966.496.396
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	2e, 5	659.582.342	659.597.303
Beban Dibayar Dimuka	2f, 6	52.520.116.563	47.639.279.467
Aset Keuangan	2d, 7	42.117.681.442	40.001.963.508
Properti Investasi	8	2.445.000.000	-
Aset Tetap			
<i>setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar</i>			
<i>Rp 3.122.851.605 dan Rp 2.387.794.749 masing-</i>			
<i>masing per 31 Desember 2018 dan 2017</i>	2g, 9	12.246.524.776	12.599.990.672
Aset Pajak Tangguhan	2m, 18d	6.856.019.590	6.393.223.402
Aset Lain-Lain	2h, 10	717.052.107	500.848.337
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>265.342.929.494</b>	<b>271.178.941.091</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
Utang Pajak	2m, 18a	275.360.912	203.224.028
Utang Re/Cogaransi	11	3.289.613.327	850.238.368
Beban yang Masih Harus Dibayar	12	1.267.537.773	941.902.790
Penampungan Sementara	13	3.048.703.129	15.328.730.852
Utang Lancar Lainnya	14	65.470.402	275.269.129
Pendapatan Diterima Dimuka	15	94.852.195.366	89.433.031.083
Cadangan Klaim	2p, 16	3.192.039.354	3.457.809.341
Liabilitas Jangka Panjang	2l, 17	1.266.827.196	909.014.313
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>107.257.747.459</b>	<b>111.399.219.904</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal	19	153.200.000.000	153.200.000.000
<i>Modal dasar sebesar dari 30.000 lembar saham,</i>			
<i>modal ditempatkan dan disetor penuh per 31</i>			
<i>Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebanyak</i>			
<i>15.320 lembar saham dengan nilai nominal Rp</i>			
<i>10.000.000 per lembar saham.</i>			
Cadangan Umum	19	3.761.254.328	2.734.815.926
Saldo Laba	19	1.333.590.235	4.105.753.606
Selisih Nilai Wajar Obligasi	2d, 7	(66.000.000)	-
Kerugian imbalan pasti setelah aset pajak tangguhan		(143.662.529)	(260.848.345)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>158.085.182.034</b>	<b>159.779.721.187</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>265.342.929.494</b>	<b>271.178.941.091</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PT JAMKRIDA JABAR**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
<b>PENDAPATAN PENJAMINAN</b>			
Imbal Jasa Penjaminan / Kafalah	2j, 2n, 20	41.301.947.325	30.928.168.179
Beban Fee Base Income Bank	2j, 2n, 20	(55.858.210)	(61.781.599)
Beban Komisi Agen	2j, 2n, 20	(5.358.825.486)	(3.732.520.703)
Restitusi IJP	2j, 2n, 20	(1.434.279.301)	(864.443.212)
Manajemen Fee	2j, 2n, 20	744.034.313	1.399.996.300
<b>JUMLAH PENDAPATAN PENJAMINAN</b>		<b>35.197.018.641</b>	<b>27.669.418.965</b>
<b>BEBAN KLAIM</b>			
Beban Klaim	2j, 2p, 22	(22.490.345.113)	(14.274.790.505)
Pemulihan Cadangan Klaim	2j, 2p, 22	265.769.987	1.414.447.305
Beban Regaransi	2j, 2p, 22	(11.580.809.268)	(9.770.245.974)
<b>JUMLAH BEBAN KLAIM</b>		<b>(33.805.384.394)</b>	<b>(22.630.589.174)</b>
<b>PENDAPATAN PENJAMINAN BERSIH</b>		<b>1.391.634.247</b>	<b>5.038.829.791</b>
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>			
Pendapatan Investasi	2j, 21	13.359.578.616	13.625.450.700
Pendapatan (Beban) Lain-lain	2j, 24	1.582.504.224	(1.679.491.057)
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>		<b>16.333.717.087</b>	<b>16.984.789.434</b>
<b>BEBAN USAHA</b>			
Beban Operasional	2j, 23	(1.580.905.049)	(1.196.315.041)
Beban Sumber Daya Manusia	2j, 23	(11.074.805.430)	(9.738.935.138)
Beban Administrasi dan Umum	2j, 23	(2.846.274.500)	(3.359.775.033)
<b>JUMLAH BEBAN USAHA</b>		<b>(15.501.984.979)</b>	<b>(14.295.025.212)</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		<b>831.732.108</b>	<b>2.689.764.222</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>			
Beban Pajak Kini	2m, 18b	-	-
Manfaat Pajak Tangguhan	2m, 18d	501.858.126	1.415.989.384
<b>JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>501.858.126</b>	<b>1.415.989.384</b>
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		<b>1.333.590.235</b>	<b>4.105.753.606</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>			
<b>POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI</b>			
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		156.247.754	(353.325.814)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi	18d	(39.061.939)	88.331.454
<b>JUMLAH POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI</b>		<b>117.185.816</b>	<b>(264.994.361)</b>
<b>LABA KOMPREHENSIF</b>		<b>1.450.776.050</b>	<b>3.840.759.246</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PT JAMKRIDA JABAR**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

	Catatan	Modal Disetor	Cadangan Umum	Selisih Nilai Wajar Obligasi	Keuntungan (kerugian) imbalan pasti setelah aset pajak tangguhan	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
<b>Saldo Per 31 Desember 2016</b>		<b>145.200.000.000</b>	<b>1.379.631.574</b>	<b>-</b>	<b>4.146.016</b>	<b>5.420.737.408</b>	<b>152.004.514.998</b>
Modal Disetor	19	8.000.000.000	-	-	-	-	8.000.000.000
Cadangan Umum	19	-	1.355.184.352	-	-	(1.355.184.352)	-
Pembagian Dividen	19	-	-	-	-	(2.769.996.815)	(2.769.996.815)
Bonus dan Tantiem	19	-	-	-	-	(1.187.141.492)	(1.187.141.492)
CSR	19	-	-	-	-	(108.414.748)	(108.414.748)
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	-	4.105.753.606	4.105.753.606
Penghasilan komprehensif lain imbalan kerja setelah aset pajak tangguhan		-	-	-	(264.994.361)	-	(264.994.361)
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>		<b>153.200.000.000</b>	<b>2.734.815.926</b>	<b>-</b>	<b>(260.848.345)</b>	<b>4.105.753.606</b>	<b>159.779.721.188</b>
Modal Disetor	19	-	-	-	-	-	-
Cadangan Umum	19	-	1.026.438.402	-	-	(1.026.438.402)	-
Pembagian Dividen	19	-	-	-	-	(2.098.040.093)	(2.098.040.093)
Bonus dan Tantiem	19	-	-	-	-	(899.160.040)	(899.160.040)
CSR	19	-	-	-	-	(82.115.072)	(82.115.072)
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	-	1.333.590.235	1.333.590.235
Selisih Nilai Wajar Obligasi	2d, 7	-	-	(66.000.000)	-	-	(66.000.000)
Penghasilan komprehensif lain imbalan kerja setelah aset pajak tangguhan		-	-	-	117.185.816	-	117.185.816
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>		<b>153.200.000.000</b>	<b>3.761.254.328</b>	<b>(66.000.000)</b>	<b>(143.662.529)</b>	<b>1.333.590.235</b>	<b>158.085.182.034</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



## PT JAMKRIDA JABAR

## LAPORAN ARUS KAS

## UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Disajikan dalam Rupiah penuh)

	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Penerimaan dari Penjaminan	2n,2j,14,19	23.721.088.093	73.984.207.418
Pembayaran Klaim dan Regaransi	2j,2o,10,21	(36.815.493.995)	(27.370.133.348)
Pembayaran kepada Karyawan dan Pemasok	11,12,13,22,23	(14.180.730.602)	(33.489.242.812)
Pembayaran Pajak Penghasilan	2m, 25	(2.443.154.042)	(2.913.651.269)
Pendapatan dari Investasi	2j,2e,5,20	13.359.578.616	13.625.450.700
Pendapatan subrogasi dan lainnya	25	4.025.658.267	-
<b>KAS BERSIH DIPEROLEH DARI</b>			
<b>(DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI</b>		<b>(12.333.053.664)</b>	<b>23.836.630.689</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
Penempatan Aset Keuangan	2d, 7	(2.181.717.934)	(23.523.836.782)
Properti Investasi	2d, 8	(2.445.000.000)	-
Pengadaan Aset Tetap	2g, 9	(381.590.960)	(1.625.651.500)
Pengadaan Aset Lain lain	2h, 10	(82.174.270)	(192.500.000)
Aset Dalam Penyelesaian	2h, 10	(134.029.500)	(8.300.000)
<b>KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI</b>		<b>(5.224.512.664)</b>	<b>(25.350.288.282)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
Kenaikan Modal Disetor	19	-	8.000.000.000
Pembagian Dividen	19	(2.098.040.093)	(2.769.996.815)
Pembagian Bonus dan Tantiem	19	(899.160.040)	(1.187.141.492)
CSR	19	(82.115.072)	(108.414.748)
<b>KAS BERSIH DIPEROLEH DARI</b>			
<b>(DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN</b>		<b>(3.079.315.205)</b>	<b>3.934.446.945</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>		<b>(20.636.881.532)</b>	<b>2.420.789.350</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>		<b>160.417.542.006</b>	<b>157.996.752.656</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>		<b>139.780.660.474</b>	<b>160.417.542.006</b>
<b>Kas dan Setara Kas terdiri atas :</b>			
Kas		187.880.446	253.292.138
Giro Bank		5.706.277.395	12.877.747.235
Deposito		133.886.502.633	147.286.502.633
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>		<b>139.780.660.474</b>	<b>160.417.542.006</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PT JAMKRIDA JABAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

---

---

**1. INFORMASI UMUM**

---

**a. Pendirian Perusahaan dan informasi umum**

PT JAMKRIDA JABAR, selanjutnya disebut "Perusahaan", dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2011, dan telah diaktakan berdasarkan akta No. 03 tanggal 03 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Yuliani Idawati, S.H.Sp.N. Notaris di Kota Bandung. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-56159.AH.01.01 tahun 2012.

Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan Perusahaan dapat membuka cabang sebagaimana telah ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan dewan komisaris.

Perusahaan mempunyai Unit Usaha Syariah pada tahun 2015. Unit Usaha Syariah dibentuk oleh Keputusan Direksi PT JAMKRIDA JABAR Nomor: Kep-0008/DIR/JJ/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Panitia Pembentukan Unit Syariah dan telah mendapat izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan Nomor: SR-5/NB.223/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah PT JAMKRIDA JABAR.

Perusahaan dalam menjalankan usahanya telah memperoleh izin-izin sebagai berikut:

- 1) Salinan Keputusan Dewan Komisiner No. Kep.05/D.05/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT JAMKRIDA JABAR.
- 2) Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 503/014/DP-SKJ/II/2015 tanggal 17 Februari 2013 dari Pemerintah Kota Bandung.
- 3) Surat Izin Walikota Bandung Tentang Izin Gangguan/Kartu Herregistrasi IG/ITU No. 503/IG/DJ03/BPPT tanggal 20 April 2015 dari Pemerintah Kota Bandung.
- 4) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No. 101114618463 tanggal 23 April 2015 dari Pemerintah Kota Bandung.
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 31.625.184.2-422.000 dari Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia.

**b. Usaha**

Perusahaan bergerak dalam bidang penjamin pembiayaan kepada usaha mikro, kecil menengah dan koperasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perusahaan dapat melaksanakan:

- Penjaminan kredit untuk penguatan modal bagi koperasi dan UMKM.
- Penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi pada anggotanya.
- Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia.
- Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan BUMN dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- Penjaminan surat utang.
- Penjaminan transaksi dagang.
- Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*).
- Penjaminan bank garansi.
- Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri.
- Penjaminan *letter of credit*.
- Penjaminan kepabeanan.
- Jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan.
- Penyediaan informasi terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan.
- Penjaminan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kafalah Pembiayaan Syariah adalah suatu kegiatan pelengkap bagi suatu pembiayaan dengan pola syariah, dengan demikian harus terdapat akad/perjanjian pembiayaan antara Terjamin (*Makfuul 'Anhu*) dan Penerima Jaminan (*Makfuul Lahu*). Namun demikian karena Kafalah Pembiayaan berfungsi sebagai substitusi agunan maka PT Jamkrida Jabar melalui penerbitan Surat Persetujuan Prinsip Kafalah dapat menjadi dasar ditandatanganinya suatu perjanjian pembiayaan. Seluruh kegiatan Kafalah Pembiayaan mengacu pada fatwa DSN-MUI.



**PT JAMKRIDA JABAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

---

---

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

---

**c. Tempat Usaha**

Perusahaan beroperasi di Jalan Soekarno-Hatta No. 592 Buah batu Bandung, Jawa Barat 40286.  
Tujuan pendirian PPKD (Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah) untuk meningkatkan penyaluran kredit produktif dan peningkatan LDR dari BPR, Bank Umum dan BPR yang terdapat di wilayah PPKD.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kegiatan perekonomian daerah.

Dari sisi sosial lingkungan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

**d. Susunan Pengurus**

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Jamkrida Jabar Nomor 38 tanggal 28 November 2014 dan Surat Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor : U-388/DSN-MUI/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang merekomendasikan dan menetapkan Zaini Abdul Malik, S. Ag., MA sebagai Ketua dan Khozin Abu Faqih, Lc sebagai Wakil Ketua.

Berdasarkan hasil RUPS pada tanggal 03 Januari 2017, susunan pengurus PT Jamkrida Jabar adalah sebagai berikut:

**2017:**

**Dewan Pengawas Syariah**

: Zaini Abdul Malik, S. Ag., MA  
: Khozin Abu Faqih, Lc.

**Komisaris**

Komisaris : Rodhiallah  
Komisaris : Syafrial Firdaus

**Direksi**

Direktur Utama : Tri Budhi Muljawan  
Direktur Keuangan : Budi Setyono  
Direktur Operasional : Asep Gunawan Sirad

Sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 04 tanggal 14 Mei 2014, Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan untuk mengangkat serta menetapkan Tuan Tri Budhi Muljawan sebagai Direktur Utama dan Tuan Budi Setyono sebagai Direktur Keuangan, terhitung efektif sejak ditutupnya rapat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun 2017 untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2016. Pada Januari 2017 sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 01 tanggal 03 Januari 2017, Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan untuk mengangkat serta menetapkan Tuan Rodhiallah dan Tuan Syafrial Firdaus sebagai Komisaris dan Tuan Asep Gunawan Sirad sebagai Direktur Operasional, terhitung efektif sejak ditutupnya rapat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2020.

**2016:**

**Dewan Pengawas Syariah**

: Zaini Abdul Malik, S. Ag., MA  
: Khozin Abu Faqih, Lc.

**Komisaris**

Komisaris : Syafrial Firdaus

**Direksi**

Direktur Utama : Tri Budhi Muljawan  
Direktur Keuangan : Budi Setyono

---

## **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

---

Kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang diterapkan oleh Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia. Standar Akuntansi yang diterapkan secara konsisten dalam penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

### **a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan PT JAMKRIDA JABAR disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan disusun berdasarkan azas akrual dengan menggunakan konsep nilai perolehan, kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur dengan dasar sebagaimana dijelaskan di dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode langsung, yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).

### **b. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi**

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, manajemen Perusahaan harus menggunakan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi, jumlah aset dan liabilitas serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

### **c. Perubahan dalam Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2017 seperti yang diungkapkan pada catatan ini.

#### **Standar Akuntansi Baru**

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017 adalah:

Amandemen PSAK No. 1 "Penyajian laporan keuangan" tentang "prakarsa pengungkapan". Amandemen PSAK No. 1 memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.

Perusahaan telah menganalisa penerapan standar dan interpretasi akuntansi tersebut di atas dan penerapan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan kecuali yang dijelaskan di bawah ini.



---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

---

### c. Perubahan dalam Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

#### i. Penyajian pos-pos dalam penghasilan komprehensif lain

Terkait dengan penerapan PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan", Perusahaan telah memodifikasi penyajian pos-pos dalam penghasilan komprehensif lain dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Untuk menyajikan pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada masa yang akan datang terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi. Informasi komparatif telah disajikan kembali dengan menggunakan basis yang sama.

#### ii. Pengukuran nilai wajar

Pada tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar", yang menyediakan satu sumber panduan tentang bagaimana nilai wajar diukur tetapi tidak menerapkan persyaratan baru mengenai kapan nilai wajar diperlukan. Standar ini menyediakan kerangka untuk menentukan nilai wajar dan menjelaskan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengestimasi nilai wajar. PSAK ini mengatur penggunaan harga keluar (*exit price*) dalam pengukuran nilai wajar dan persyaratan pengungkapan yang lebih ekstensif, khususnya dengan memasukkan instrumen non-keuangan ke dalam pengungkapan hirarki nilai wajar. PSAK No. 68 diterapkan secara prospektif. Perubahan ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengukuran aset dan liabilitas perusahaan.

#### iii. Imbalan Kerja

Pada tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", dimana ketika imbalan pasca-kerja berubah maka porsi kenaikan atau penurunan imbalan sehubungan dengan jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa lalu dibebankan atau dikreditkan segera dalam laba rugi. Sebelum 1 Januari 2015, beban jasa lalu yang belum diakui (*non-vested*) diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama rata-rata masa kerja karyawan hingga imbalan pasca kerja menjadi hak karyawan (*vested*).

### d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

PSAK No. 50 direvisi sehingga hanya mengatur penyajian instrumen keuangan, sedangkan prinsip pengungkapan instrumen keuangan dipindahkan ke PSAK No. 60.

Revisi PSAK No. 55 tersebut tidak memberikan pengaruh bagi laporan keuangan pada saat penerapan awal, sedangkan penerapan PSAK No. 50 dan PSAK No. 60 yang direvisi tersebut memberikan pengaruh bagi pengungkapan dalam laporan keuangan.

#### 1. Aset Keuangan

##### Pengakuan awal

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga tanggal jatuh tempo dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Aset keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar, dan dalam hal aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

---

### d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

#### 1. Aset Keuangan (lanjutan)

##### Pengakuan awal (lanjutan)

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku dipasar (pembelian yang lazim/regular) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya menjadi pinjaman yang diberikan dan piutang dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya dan jika diperbolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali setiap akhir tahun keuangan.

##### Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

##### - **Pinjaman yang diberikan dan piutang**

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan *non derivatif* dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan ini diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya dinyatakan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok ini disajikan sebagai pendapatan keuangan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

##### - **Aset keuangan yang tersedia untuk dijual**

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan *non derivatif* yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar dengan laba atau rugi yang belum direalisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, laba atau rugi kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus direklasifikasi ke dalam laba atau rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Investasi yang diklasifikasi sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut:

- i. Investasi pada saham yang tidak tersedia nilai wajarnya dengan kepemilikan kurang dari 20% dan investasi jangka panjang lainnya dicatat pada biaya perolehannya.
- ii. Investasi pada instrumen utang yang tidak ditujukan untuk dimiliki sampai jatuh tempo diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual, dan dicatat pada nilai wajar.

#### 2. Penurunan Nilai dari Aset

Perusahaan melakukan penilaian pada setiap tanggal laporan posisi keuangan apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau terus diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.



---

## **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

---

### **d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

#### **2. Penurunan Nilai dari Aset (lanjutan)**

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Nilai tercatat aset tersebut dikurang melalui akun cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralized financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari utilisasi dari jaminan deposit yang diberikan oleh pelanggan kepada Perusahaan.

Estimasi tahun antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit yaitu berdasarkan jenis pelanggan.

Arus kas masa datang dari aset keuangan Perusahaan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual atas aset-aset di dalam kelompok tersebut dan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada tahun terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada tahun historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Ketika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapusbukukan dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan piutang diklasifikasikan ke dalam "Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

Jika pada tahun berikutnya jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan, dengan menyesuaikan cadangan kerugian penurunan nilai. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada tahun berjalan, dikreditkan pada cadangan kerugian penurunan nilai, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan, dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya.

#### **3. Liabilitas Keuangan** **Pengakuan Awal**

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, utang dan pinjaman. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan memiliki kedua jenis liabilitas keuangan. Perusahaan menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

---

### d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

#### 3. Liabilitas Keuangan (lanjutan)

##### Pengakuan Awal (lanjutan)

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori (a) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (b) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang telah ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

##### i. **Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi**

Kategori ini terdiri dari liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Derivatif diklasifikasikan sebagai kewajiban diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai akun "Laba (Rugi) Perubahan Nilai Wajar *Derivatif - Neto*".

##### ii. **Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi**

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

#### 4. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran dipasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Perusahaan menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Perusahaan menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggulangi perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

---

### d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

#### 4. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Perusahaan mengukur aset dan posisi *long* berdasarkan harga penawaran dan mengukur liabilitas dan posisi *short* berdasarkan harga permintaan.

Kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, yang terekspos risiko pasar dan risiko kredit yang dikelola oleh Perusahaan berdasarkan eksposur netonya baik terhadap risiko pasar atau risiko kredit diukur berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual posisi *net long* (atau dibayar untuk mengalihkan posisi *net short*) untuk eksposur risiko tertentu. Penyesuaian pada level portofolio tersebut dialokasikan pada aset dan liabilitas individual berdasarkan penyesuaian risiko relatif dan masing-masing instrumen individual di dalam portofolio.

Sebelum 1 Januari 2015, nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan, atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*) pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika harga kuotasi sewaktu-waktu dan secara berkala tersedia dan mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan aktif dalam suatu transaksi yang wajar.

Jika pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Perusahaan menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang memahami, berkeinginan, dan jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, penggunaan analisa arus kas yang didiskonto dan penggunaan model penetapan harga opsi (*option pricing model*). Teknik penilaian yang dipilih memaksimalkan penggunaan input pasar, dan meminimalkan penggunaan taksiran yang bersifat spesifik dari Perusahaan, memasukkan semua faktor yang akan dipertimbangkan oleh para pelaku pasar dalam menetapkan suatu harga dan konsisten dengan metodologi ekonomi yang dapat diterima dalam menetapkan harga instrumen keuangan. Input yang digunakan dalam teknik penilaian secara memadai mencerminkan ekspektasi pasar dan ukuran atas faktor risiko dan pengembalian (*risk return*) yang melekat pada instrumen keuangan. Perusahaan mengkalibrasi teknik penilaian dan menguji validitasnya dengan menggunakan harga-harga dari transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi untuk instrumen yang sama atau atas dasar data pasar lainnya yang tersedia yang dapat diobservasi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima, kecuali jika nilai wajar dari instrumen keuangan tersebut ditentukan dengan perbandingan terhadap transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi dari suatu instrumen yang sama (yaitu tanpa modifikasi atau pengemasan ulang) atau berdasarkan suatu teknik penilaian yang variabelnya hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi. Jika harga transaksi memberikan bukti terbaik atas nilai wajar pada saat pengakuan awal, maka instrumen keuangan pada awalnya diukur pada harga transaksi dan selisih antara harga transaksi dan nilai yang sebelumnya diperoleh dari model penilaian diakui dalam laba rugi setelah pengakuan awal tergantung pada masing-masing fakta dan keadaan dari transaksi tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

Nilai wajar mencerminkan risiko kredit atas instrumen keuangan dan termasuk penyesuaian yang dilakukan untuk memasukkan risiko kredit Perusahaan dan pihak lawan, mana yang lebih sesuai. Taksiran nilai wajar yang diperoleh dari model penilaian akan disesuaikan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, seperti risiko likuiditas atau ketidakpastian model penilaian, sepanjang perusahaan yakin bahwa ketelibatan suatu pasar pihak ketiga akan akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam penetapan harga suatu transaksi.



---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

---

### d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

#### 4. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Aset keuangan dan posisi *long* diukur menggunakan harga penawaran; liabilitas keuangan dan posisi *short* diukur menggunakan harga permintaan. Jika perusahaan memiliki posisi aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka perusahaan dapat menggunakan nilai tengah dari harga pasar sebagai dasar untuk menentukan nilai wajar posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka bersih (*net open position*) mana yang lebih sesuai.

#### 5. Penghentian Pengakuan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluarsa, atau Perusahaan mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana perusahaan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perusahaan diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Dalam transaksi dimana Perusahaan secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan. Perusahaan menghentikan pengakuan aset tersebut jika Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset yang masih dimiliki, perusahaan tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Perusahaan dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Perusahaan menghapusbuku aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Perusahaan menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak lagi cukup untuk melunasi seluruh eksposur kredit yang diberikan.

#### 6. Penyesuaian Risiko Kredit

Perusahaan menyesuaikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit pihak lawan antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar posisi liabilitas keuangan, risiko kredit Perusahaan terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

#### 7. Reklasifikasi Instrumen Keuangan

Perusahaan tidak mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke kategori instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selama instrumen keuangan tersebut dimiliki atau diterbitkan.

Perusahaan tidak mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo (melebihi jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo) kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

---

**d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**7. Reklasifikasi Instrumen Keuangan (lanjutan)**

- i. dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga pasar tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
- ii. terjadi setelah Perusahaan telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok awal aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau pelunasan dipercepat; atau
- iii. dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga pasar tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap diakui dalam komponen ekuitas.

Sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dimana pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**8. Klasifikasi Instrumen Keuangan**

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut.

**9. Saling Hapus Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan.

Jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**e. Piutang Regaransi**

Pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggung mitra regaransi dicatat sebagai piutang dalam penyelesaian.

Pengakuan piutang dalam penyelesaian dilakukan setiap terjadi pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra regaransi. Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai piutang regaransi tatkala mitra regaransi mengaksep piutang dalam penyelesaian tersebut (sesuai dengan jangka waktu dalam Perjanjian Kerja Sama antara PT JAMKRIDA JABAR dengan mitra regaransi), namun pembayaran belum dilakukan.

Piutang usaha disajikan sebesar nilai bersihnya setelah dikurangi dengan cadangan piutang tak tertagih, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan penelaahan terhadap keadaan tiap-tiap piutang pada akhir tahun.

**f. Beban Dibayar Dimuka**

Beban dialokasikan sesuai dengan masa manfaat tiap-tiap biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

Beban regaransi dibayar di muka dialokasikan secara proporsional mengikuti pola pengakuan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK) yang terkait dengan regaransi.

**PT JAMKRIDA JABAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**g. Aset Tetap**

Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap". Revisi PSAK No. 16 ini mengatur akuntansi tanah dan mencabut PSAK No. 47, "Akuntansi Tanah". Penerapan SAK revisi ini tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada). Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi rutin yang signifikan dilakukan, yang merupakan suatu kondisi untuk menentukan kelangsungan operasional suatu jenis aset tetap, biaya atas masing-masing inspeksi signifikan tersebut diakui ke dalam jumlah tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus, berdasarkan taksiran masa manfaat laporan, sebagai berikut:

<b>Bangunan Gedung</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
Bangunan Gedung	20-30
Instalasi	15
Inventaris Kantor	2-10
Kendaraan Bermotor	5

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Biaya pinjaman, termasuk rugi selisih kurs, yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan.

Tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak diamortisasi karena manajemen berpendapat bahwa besar kemungkinan hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Selanjutnya PSAK No. 48, "Penurunan Nilai Aset", mengharuskan nilai aset dikaji ulang atas kemungkinan penurunan pada nilai wajarnya yang disebabkan oleh peristiwa atau perubahan keadaan yang menyebabkan nilai tercatat aset mungkin tidak dapat dipulihkan.

Nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh entitas saat ini atau merupakan taksiran nilai atau potensi arus kas masuk apabila aset tersebut dijual pada saat penarikan/penghentian (*retirement*) aset.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direview, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

**h. Aset Lain-Lain**

**1) Piranti Lunak /Software Komputer**

Lisensi piranti lunak komputer yang diperoleh dikapitalisasi sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan membuat piranti lunak tersebut siap untuk digunakan. Biaya ini diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya (3-5 tahun).



---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

---

### h. Aset Lain-Lain (lanjutan)

#### 1) Piranti Lunak /Software Komputer (lanjutan)

Biaya yang berhubungan dengan pengembangan atau pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya-biaya yang terkait langsung dengan produksi piranti lunak yang unik dan dapat diidentifikasi serta dikendalikan oleh Perusahaan dan kemungkinan besar akan memberikan manfaat ekonomi yang melebihi biayanya dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai aset tak berwujud. Biaya-biaya langsung ini meliputi, antara lain, biaya karyawan yang turut mengembangkan piranti lunak dan porsi biaya *overhead* yang terkait.

Biaya pengembangan piranti lunak komputer yang diakui sebagai aset dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya (tidak lebih dan 4 tahun).

#### 2) Aset Lainnya

Merupakan aset diluar *software* dengan kriteria aset ini dapat memberikan manfaat ekonomi masa datang, dan dapat memberikan nilai lebih bagi Perusahaan dan untuk mendapatkannya akibat dari transaksi atau kejadian.

### i. Sewa

Biaya pinjaman, termasuk rugi selisih kurs, yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan.

Pada awal masa sewa, *lessee* mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa. Aset sewaan yang dimiliki oleh *lessee* dengan dasar sewa pembiayaan disusutkan konsisten dengan metode yang sama yang digunakan untuk aset yang dimiliki sendiri, atau disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaat aset sewaan, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa *lessee* kepemilikan pada akhir masa sewa.

Selisih lebih hasil penjualan dan nilai tercatat yang terjadi dari suatu transaksi jual dan sewa-balik ("*sale-and-lease back*") yang merupakan sewa pembiayaan ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus ("*straight-line method*") selama sisa manfaat aset yang bersangkutan.

### j. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dicatat dan diakui atas dasar akrual (*accrual basis*) kecuali untuk imbal hasil atas penempatan dana dengan pola syariah dicatat dan diakui atas dasar kas (*cash basis*). Beban diakui sesuai dengan masa manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (*accrual basis*) Pengajuan klaim dianggap sebagai beban klaim setelah Komite Klaim menyetujui untuk melakukan pembayaran dan setelah diterbitkannya surat persetujuan klaim kepada pihak penerima jaminan.

### k. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam Rupiah untuk mencerminkan nilai kurs rata-rata antara kurs jual dan kurs beli yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada hari terakhir transaksi perbankan pada tahun tersebut. Laba atau rugi selisih kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

**PT JAMKRIDA JABAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

---

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

---

**l. Imbalan Kerja Karyawan**

Perusahaan mengakui kewajiban kerja karyawan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("Undang-Undang") dan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja".

Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja". Revisi SAK ini antara lain memperbolehkan entitas untuk menerapkan metode sistematis atas pengakuan yang lebih cepat dari keuntungan/kerugian aktuarial yang timbul dari imbalan pasti, antara lain pengakuan langsung keuntungan/kerugian yang terjadi pada tahun berjalan ke dalam pendapatan komprehensif lain.

Perusahaan memilih metode ini dalam pengakuan keuntungan/kerugian aktuarial, karenanya penerapan awal PSAK No. 24 (Revisi 2013) ini berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Untuk program iuran pasti, kontribusi yang terutang diakui sebagai beban pada tahun berjalan.

Berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), beban imbalan pasca kerja manfaat pasti ditentukan dengan metode penilaian aktuaris *Projected Unit Credit* dan keuntungan dan kerugian aktuarial diakui pada tahun dimana keuntungan dan kerugian terjadi dalam pendapatan komprehensif lain.

Biaya jasa lalu atas pengenalan program manfaat pasti atau perubahan utang imbalan dari program yang ada diamortisasi sepanjang tahun sampai imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*.

Beban imbalan jangka panjang lainnya ditentukan dengan metode penilaian aktuaris *Projected Unit Credit* dimana keuntungan dan kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu langsung diakui dalam tahun berjalan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar di antara 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal tersebut dan 10% dari nilai wajar aset program pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian ini diakui dengan metode garis lurus sepanjang rata-rata sisa masa kerja dari karyawan.

**m. Pajak Penghasilan**

Perusahaan menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan" yang menetapkan perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan mendatang dari pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan transaksi dan kejadian lain dari tahun kini yang diakui dalam laporan keuangan. SAK revisi ini juga mensyaratkan entitas untuk mencatat kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perusahaan juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" Penerapan awal SAK revisi ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer pada setiap tanggal laporan antara aset dan kewajiban untuk tujuan komersial aset dan kewajiban untuk tujuan perpajakan. Manfaat pajak masa yang akan datang, seperti rugi pajak yang dapat dikompensasi, juga diakui apabila besar kemungkinan manfaat tersebut dapat direalisasi.

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

---

### m. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal neraca.

Perubahan nilai tercatat aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada operasi tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan atas kewajiban perpajakan dicatat ketika ketetapan pajak diterima atau jika keberatan diajukan oleh Perusahaan, ketika hasil dari keberatan tersebut telah ditentukan.

### n. Imbal Jasa Penjaminan, Imbal Jasa Kafalah, *Fee Based Income* Bank Pelaksana, dan Beban Regaransi

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi diakui pada saat Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK) diterbitkan.

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan, Imbal Jasa Kafalah, *fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi diakui selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK).

Batas waktu maksimal pengakuan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi adalah 4 tahun dan diakui ulang tahun. Mulai November 2016 pengakuan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income*, biaya komisi agen dan beban regaransi diakui sesuai jangka waktu kredit.

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK) disajikan secara bruto.

Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK) yang sudah diterima namun belum diakui sebagai pendapatan disajikan sebagai pendapatan diterima dimuka. *Fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi yang sudah dibayarkan namun belum diakui sebagai beban disajikan sebagai beban dibayar dimuka.

### o. Utang Klaim

Utang klaim merupakan utang Perusahaan kepada bank pemberi pinjaman yang dijamin oleh Perusahaan. Utang klaim yang tercatat adalah utang yang telah diproses dan disetujui namun belum dibayar. Utang klaim dinyatakan sebesar prosentase penjaminan atas baki debit pinjaman yang macet.

### p. Cadangan Klaim

Cadangan klaim minimal yang dapat dibentuk ditetapkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.5/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan Pasal 22 poin 1 bahwa Cadangan klaim ditetapkan sebesar 0,01% dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri.

Kenaikan/(penurunan) cadangan klaim merupakan selisih cadangan klaim periode berjalan dan periode sebelumnya.



---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

---

**q. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Berelasi (lanjutan)**

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor,
  - ii. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
  - iii. Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.
- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:
  - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Perusahaan yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain),
  - ii. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Perusahaan, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya),
  - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama,
  - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga,
  - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor,
  - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a),
  - vii. Orang yang diidentifikasi, dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan persyaratan dan kondisi yang sama dengan yang diberlakukan kepada pihak ketiga telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

**r. Informasi Segmen**

Sehubungan dengan penerapan PSAK No. 5 (Revisi 2000), "Pelaporan Segmen", Perusahaan menyajikan informasi keuangan berdasarkan segmen usaha dan segmen geografis. Sesuai dengan struktur organisasi dan manajemen serta sistem pelaporan internal Perusahaan, informasi segmen primer disajikan berdasarkan segmen usaha dan informasi segmen sekunder disajikan berdasarkan segmen geografis.

Segmen geografis adalah komponen Perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain.

**PT JAMKRIDA JABAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

**3. KAS DAN SETARA KAS**

Kas dan setara kas per 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Kas</b>	<b>187.880.446</b>	<b>253.292.138</b>
<b>Giro Bank</b>		
Bank Umum	3.117.689.320	10.600.869.776
Bank Umum Syariah	1.127.430.543	629.654.694
Bank BPR	698.166.607	806.554.268
Bank BPR Syariah	762.990.925	840.668.497
<b>Jumlah Giro Bank</b>	<b>5.706.277.395</b>	<b>12.877.747.235</b>
<b>Deposito</b>		
Bank Umum	72.221.502.633	88.221.502.633
Bank Umum Syariah	28.050.000.000	30.550.000.000
Bank BPR	9.615.000.000	8.515.000.000
Bank BPR Syariah	24.000.000.000	20.000.000.000
<b>Jumlah Deposito</b>	<b>133.886.502.633</b>	<b>147.286.502.633</b>
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>	<b>139.780.660.474</b>	<b>160.417.542.006</b>

Penempatan deposito PT Jamkrida Jabar per 31 Desember 2018 di beberapa perbankan di Indonesia mendapatkan tingkat suku bunga dari 5,25% p.a. s/d 11,03% p.a dan per 31 Desember 2017 mendapatkan tingkat suku bunga dari 5,25% p.a. s/d 10,75% p.a.

**4. PIUTANG RE/COGARANSI**

Akun ini terdiri dari:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Piutang Re/Cogaranasi	8.000.292.199	2.966.496.396
<b>Jumlah Piutang Re/Cogaranasi</b>	<b>8.000.292.199</b>	<b>2.966.496.396</b>

Piutang Re/Cogaranasi merupakan tagihan atas klaim dan restitusi kepada broker Best One Asia Reinsurance Broker (BOARE) dan PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (JAKRE) yang di Reasuransi ke PT Nasional Reasuransi Indonesia serta tagihan atas klaim dan restitusi kepada PT Jamkrida Banten.

**5. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA**

Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Pendapatan Bunga Investasi	495.101.676	617.085.385
Pendapatan Management Fee	164.480.666	42.511.918
<b>Jumlah Pendapatan yang Masih Harus Diterima</b>	<b>659.582.342</b>	<b>659.597.303</b>

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan bunga investasi yang berasal dari deposito, pendapatan kupon obligasi atas investasi, komisi atas Re/Cogaranasi (management fee).

**6. BEBAN DIBAYAR DIMUKA**

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari :

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
IJP Re/Cogaranasi	38.742.271.300	35.442.394.303
Komisi Agen/Broker	13.399.036.170	11.973.452.949
Fee Based Income Bank	129.609.236	62.269.820
Piutang Lainnya	99.033.673	40.147.010
Beban Operasional Dibayar Dimuka	150.166.184	121.015.385
<b>Jumlah Beban Dibayar Dimuka</b>	<b>52.520.116.563</b>	<b>47.639.279.467</b>

**PT JAMKRIDA JABAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

**6. BEBAN DIBAYAR DIMUKA (lanjutan)**

Beban dialokasikan sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus. Masa manfaat asuransi kendaraan, asuransi kesehatan dan sewa kendaraan sesuai dengan jangka waktu kontrak atau polis.

Beban IJP Re/Cogaransi, IJK Re/Cogaransi dan fee based income bank dibayar dimuka diakui selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan tahun terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK). Dengan mempertimbangkan banyaknya pinjaman yang dipercepat pelunasannya, manajemen menetapkan batas waktu maksimal fee based income bank pelaksana dan beban Re/Cogaransi adalah 4 tahun. Mulai November 2016 pengakuan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), fee based income, biaya komisi agen dan beban Re/Cogaransi diakui sesuai jangka waktu kredit.

Beban dibayar dimuka Re/Cogaransi merupakan pembayaran IJP dan IJK tahun berjalan dan tahun-tahun lalu ke mitra Re/Cogaransi yang akan menjadi beban di tahun-tahun mendatang.

Manajemen berkeyakinan biaya dibayar dimuka untuk IJP dan IJK Re/Cogaransi dan fee based income bank telah dialokasikan sesuai jangka waktu penjaminan.

**7. ASET KEUANGAN**

**Obligasi Tersedia Untuk Dijual**

<u>Obligasi</u>	<u>Kupon</u>	<u>Jatuh Tempo</u>	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
FR0059	7,00%	15 Mei 2027	2.066.000.000	-
<b>Harga Perolehan</b>			<b>2.066.000.000</b>	-
Selisih Nilai Wajar Obligasi			(66.000.000)	-
<b>Jumlah Obligasi Tersedia Untuk Dijual</b>			<b>2.000.000.000</b>	-

**Obligasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo**

<u>Obligasi</u>	<u>Kupon</u>	<u>Jatuh Tempo</u>	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
PBS013	6,25%	13 Mei 2019	6.000.000.000	6.000.000.000
FR0059	7,00%	15 Mei 2027	5.000.000.000	5.000.000.000
FR0061	7,00%	15 Mei 2022	6.000.000.000	6.000.000.000
PBS014	6,50%	15 Mei 2021	9.500.000.000	9.500.000.000
Hutama Karya	8,70%	06 Juni 2027	6.000.000.000	6.000.000.000
Waskita Karya	8,50%	06 Okt 2022	5.000.000.000	5.000.000.000
PT KAI	8,25%	06 Okt 2022	3.000.000.000	3.000.000.000
<b>Harga Perolehan</b>			<b>40.500.000.000</b>	<b>40.500.000.000</b>
Diskonto Obligasi			(466.607.006)	(594.354.625)
Premium Obligasi			84.288.448	96.318.133
<b>Jumlah Obligasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo</b>			<b>40.117.681.442</b>	<b>40.001.963.508</b>
<b>Jumlah Aset Keuangan</b>			<b>42.117.681.442</b>	<b>40.001.963.508</b>

Aset Keuangan Perusahaan merupakan Investasi dalam bentuk Obligasi yang tersedia untuk dijual dan obligasi yang disimpan tidak untuk diperjualbelikan hingga jatuh tempo.

Berdasarkan PSAK 55 Aset keuangan disajikan sebesar harga perolehan diamortisasi (*amortized cost*). Biaya perolehan diamortisasi dari jumlah aset keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi dengan pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dilakukan penurunan (baik secara langsung maupun menggunakan perkiraan cadangan) untuk penurunan atau nilai yang tidak dapat ditagih.

**8. PROPERTI INVESTASI**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Properti tanah dan bangunan	2.445.000.000	-
	<b>2.445.000.000</b>	-

Akun properti investasi merupakan investasi dalam bentuk tanah dan bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan untuk mendapatkan manfaat ekonomi bagi Perusahaan berupa pendapatan sewa.



**PT JAMKRIDA JABAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

**9. ASET TETAP**

Aset tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari :

	Saldo 31 Desember 2017	Mutasi tahun 2018		Saldo 31 Desember 2018
		Penambahan	Pengurangan	
<b>Harga Perolehan</b>				
Inventaris Kantor	1.780.868.171	116.597.156	-	1.897.465.327
Kendaraan	2.622.900.000	264.990.000	-	2.887.890.000
Gedung	7.120.517.250	3.804	-	7.120.521.054
Tanah	3.463.500.000	-	-	3.463.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>14.987.785.421</b>	<b>381.590.960</b>	<b>-</b>	<b>15.369.376.381</b>
<b>Akumulasi penyusutan</b>				
Inventaris Kantor	(911.645.602)	(325.057.316)	-	(1.236.702.918)
Kendaraan	(1.125.338.750)	(243.854.125)	-	(1.369.192.875)
Gedung	(350.810.397)	(166.145.415)	-	(516.955.812)
<b>Jumlah</b>	<b>(2.387.794.749)</b>	<b>(735.056.856)</b>	<b>-</b>	<b>(3.122.851.605)</b>
<b>Nilai buku</b>	<b>12.599.990.672</b>			<b>12.246.524.776</b>
	Saldo 31 Desember 2016	Mutasi tahun 2017		Saldo 31 Desember 2017
		Penambahan	Pengurangan	
<b>Harga Perolehan</b>				
Inventaris Kantor	1.545.742.351	276.401.500	41.275.680	1.780.868.171
Kendaraan	2.048.250.000	574.650.000	-	2.622.900.000
Gedung	6.345.917.250	774.600.000	-	7.120.517.250
Tanah	3.463.500.000	-	-	3.463.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>13.403.409.601</b>	<b>1.625.651.500</b>	<b>41.275.680</b>	<b>14.987.785.421</b>
<b>Akumulasi penyusutan</b>				
Inventaris Kantor	(607.173.912)	(345.747.370)	(41.275.680)	(911.645.602)
Kendaraan	(797.967.500)	(327.371.250)	-	(1.125.338.750)
Gedung	(195.952.884)	(154.857.513)	-	(350.810.397)
<b>Jumlah</b>	<b>(1.601.094.296)</b>	<b>(827.976.133)</b>	<b>(41.275.680)</b>	<b>(2.387.794.749)</b>
<b>Nilai buku</b>	<b>11.802.315.305</b>			<b>12.599.990.672</b>

Aset tetap sudah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kebongkaran, gempa bumi, kecelakaan dan risiko lainnya. Manajemen berpendapat bahwa semua aset tetap tersebut relatif aman. Aset tetap disusutkan setelah dikurangi dengan nilai residu dengan besaran yang telah ditentukan sesuai dengan kebijakan Perusahaan. pengurangan aset tetap tahun 2017 terjadi atas penghapusan aset inventaris dari kantor lama.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke tiap-tiap akun aset tetap yang bersangkutan dan penyusutan dimulai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai tujuannya semula.

**10. ASET LAIN-LAIN**

Aset lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari :

	2018	2017
<i>Software</i>	692.242.755	632.157.755
Aset Lainnya	367.000.000	175.000.000
<b>Harga Perolehan Aset Lain-Lain</b>	<b>1.059.242.755</b>	<b>807.157.755</b>
 Akumulasi Amortisasi <i>Software</i>	(411.615.986)	(280.309.423)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(213.104.162)	(174.999.995)
<b>Akumulasi Amortisasi Aset Lain-Lain</b>	<b>(624.720.148)</b>	<b>(455.309.418)</b>
<b>Nilai Buku Aset Lain-Lain</b>	<b>434.522.607</b>	<b>351.848.337</b>
 <b>Aset Dalam Penyelesaian</b>		
Gedung Dalam Proses	134.029.500	-
Aset Lain-Lain Dalam Proses	148.500.000	149.000.000
<b>Jumlah Aset Dalam Penyelesaian</b>	<b>282.529.500</b>	<b>149.000.000</b>
<b>Jumlah Aset Lain-Lain</b>	<b>717.052.107</b>	<b>500.848.337</b>

*Software* adalah pengeluaran untuk mendapatkan lisensi perangkat lunak komputer atau pengeluaran untuk membuat perangkat lunak komputer oleh pihak ketiga dikapitalisir dan diamortisasi selama 4 tahun.

**PT JAMKRIDA JABAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

**10. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)**

Aset lainnya merupakan saldo pengeluaran untuk memperoleh pemeringkatan atas PT Jamkrida Jabar dan sistem SDM PT Jamkrida Jabar dengan estimasi empat tahun dan metode amortisasi yang digunakan metode garis lurus.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke tiap-tiap akun aset tetap yang bersangkutan dan penyusutan dimulai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai tujuannya semula.

**11. UTANG Re/Cogaransi**

Utang Re/Cogaransi per 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<i>Best One Asia Reinsurance Broker</i> (BOARE)	2.944.039.508	661.048.435
PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (JAKRE)	345.573.819	189.189.933
<b>Jumlah Utang Re/Cogaransi</b>	<b>3.289.613.327</b>	<b>850.238.368</b>

Utang kepada broker *Best One Asia Reinsurance Broker* (BOARE) dan PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (JAKRE) merupakan utang premi IJP dan IJK yang harus dibayarkan Perusahaan untuk mengalihkan risiko klaim yang diakibatkan meninggal, PHK dan macet atas terjamin atas Kredit Multiguna, KCR, Mikro dan Umum. Dicatat secara akrual sesuai dengan tarif yang ditetapkan Perusahaan.

**12. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

Beban yang masih harus dibayar per 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari :

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Pembuatan Sistem	-	35.208.456
Beban Umum yang masih harus dibayar	347.157.680	411.818.062
Biaya Aktuaria	-	9.000.000
Biaya Gedung dan Rak Arsip	-	135.920.000
Biaya Pegawai Yang Masih Harus di Bayar	602.958.425	146.942.708
Biaya Komisi Agen	306.350.827	179.217.820
Cadangan CSR	11.070.841	23.795.744
<b>Jumlah Beban Yang Masih Harus Dibayar</b>	<b>1.267.537.773</b>	<b>941.902.790</b>

Merupakan kewajiban Perusahaan yang masih harus dibayar kepada vendor atas kerjasama yang dilakukannya dengan PT Jamkrida Jabar, biaya keamanan, insentif dan uang makan, transport, uang lembur karyawan dan biaya komisi agen bulan Desember 2018 yang biasa dibayarkan setiap tanggal 7 bulan berikutnya.

**13. PENAMPUNGAN SEMENTARA**

Penampungan sementara per 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Penampungan IJP Bank Umum	1.946.002.207	14.203.743.862
Penampungan IJP Bank Syariah	294.817.347	467.368.341
Penampungan IJP Bank BPR	649.265.006	615.873.548
<b>Jumlah Penampungan Sementara IJP</b>	<b>2.890.084.560</b>	<b>15.286.985.751</b>
Penampungan Sementara Subrogasi	158.618.570	41.745.101
<b>Jumlah Penampungan Sementara</b>	<b>3.048.703.129</b>	<b>15.328.730.852</b>

Akun Penampungan IJP terdiri dari Imbal Jasa Penjaminan yang telah diterima namun belum diterbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK)-nya, kelebihan pembayaran IJP dan IJK.

Penampungan sementara subrogasi merupakan bagian yang harus dibayar kepada pihak Re/Cogaransi atas pendapatan subrogasi yang telah diterima oleh perusahaan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

**PT JAMKRIDA JABAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

**14. UTANG LANCAR LAINNYA**

Utang lancar lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Utang Kendaraan Jatuh Tempo Kurang dari 1 tahun	44.833.325	253.984.316
Utang Pembayaran Premi BPJS	20.637.077	21.284.813
<b>Jumlah Utang Lancar Lainnya</b>	<b>65.470.402</b>	<b>275.269.129</b>

Merupakan kewajiban perusahaan yang penyelesaiannya kurang dari satu tahun terdiri dari Utang kendaraan dan premi BPJS.

**15. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA**

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Imbal Jasa Penjaminan Pihak Berelasi	81.046.411.103	80.051.465.895
Imbal Jasa Penjaminan Pihak Ketiga	5.358.165.210	3.850.480.413
Imbal Jasa Kafalah - Pihak Berelasi	1.664.666.890	1.507.354.180
Imbal Jasa Kafalah - Pihak Ketiga	6.782.952.163	4.023.730.595
<b>Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>94.852.195.366</b>	<b>89.433.031.083</b>

Imbal Jasa Penjaminan dan Imbalan Jasa Kafalah diterima dimuka merupakan pembayaran IJP dan IJK penjaminan tahun berjalan dari Terjamin kepada Perusahaan yang akan menjadi pendapatan di tahun-tahun mendatang.

Imbal Jasa Penjaminan dan Imbalan Jasa Kafalah diterima dimuka dan Imbalan Jasa Kafalah akan diakui sebagai pendapatan IJP dan pendapatan IJK selama sisa jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan tahun terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK). Dengan mempertimbangkan banyaknya kredit yang dipercepat pelunasannya, manajemen menetapkan batas waktu maksimal alokasi Imbal Jasa Penjaminan dan Imbal Jasa Kafalah diterima dimuka adalah 4 (empat) tahun. Mulai November 2016 pengakuan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), fee based income, biaya komisi agen dan beban Re/Cogaransi diakui sesuai jangka waktu kredit.

**16. CADANGAN KLAIM**

Cadangan klaim per 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari :

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Saldo Awal	3.457.809.341	4.872.256.646
Penambahan Cadangan Klaim	-	-
Pengurangan Cadangan Klaim	(265.769.987)	(1.414.447.305)
<b>Jumlah Cadangan Klaim</b>	<b>3.192.039.354</b>	<b>3.457.809.341</b>

Cadangan Klaim merupakan pembentukan cadangan atas klaim yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun mendatang atas penjaminan yang belum jatuh tempo.

Cadangan klaim minimal yang dibentuk telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.5/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.

**17. LIABILITAS JANGKA PANJANG**

Liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari :

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Utang Kendaraan Jatuh Tempo Lebih dari 1 tahun	-	44.833.325
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	1.002.885.658	864.180.988
Kewajiban Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	263.941.538	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>1.266.827.196</b>	<b>909.014.313</b>

**PT JAMKRIDA JABAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

**17. LIABILITAS JANGKA PANJANG (lanjutan)**

Standar akuntansi PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" berlaku efektif untuk laporan keuangan dengan periode dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2015 dan diterapkan secara retrospektif.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Perhitungan kewajiban imbalan pasca kerja berikut didasarkan pada Laporan Aktuaris yang dilakukan oleh PT Padma Rada Aktuaris dengan rincian sebagai berikut:

**Imbalan Pasca Kerja**

**a. Rekonsiliasi NKKIP dan Nilai Wajar Aset Program atas Aset dan Kewajiban**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	1.002.885.658	864.180.988
Nilai wajar Aset	-	-
<b>Status Pendanaan</b>	1.002.885.658	864.180.988
Jumlah lain yang diakui	-	-
<b>Kewajiban diakui di laporan posisi keuangan</b>	<b>1.002.885.658</b>	<b>864.180.988</b>

**b. Mutasi Kewajiban dan Aset yang Diakui di Laporan Posisi Keuangan**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Kewajiban awal periode	846.353.145	221.502.633
Beban yang diakui di laba/rugi	312.780.267	59.765.820
Kerugian (keuntungan) komprehensif lainnya	(156.247.754)	353.325.814
Penyesuaian atas koreksi	-	344.546.721
Pembayaran Manfaat	-	(114.960.000)
<b>Kewajiban akhir periode</b>	<b>1.002.885.658</b>	<b>864.180.988</b>

**c. Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Biaya jasa kini	249.949.565	137.849.942
Biaya bunga	62.830.702	17.449.670
Biaya jasa lalu vested	-	(95.533.792)
<b>Jumlah Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi</b>	<b>312.780.267</b>	<b>59.765.820</b>

**d. Pengakuan (Keuntungan) Kerugian Aktuaris**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
(Keuntungan) kerugian aktuaris yang belum diakui pada awal periode akuntansi	-	-
(Keuntungan) kerugian aktuaris - kewajiban	(156.247.754)	353.325.814
<b>Jumlah (keuntungan) kerugian aktuaris yang diakui</b>	<b>(156.247.754)</b>	<b>353.325.814</b>

**e. Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya yang diakui**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
(Keuntungan) kerugian aktuaris dari kewajiban	(156.247.754)	353.325.814
Perubahan lainnya	-	-
<b>Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya yang diakui</b>	<b>(156.247.754)</b>	<b>353.325.814</b>

**f. Akumulasi Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya yang diakui**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Saldo Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya awal periode	-	14.239.656
Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya tahun berjalan	(156.247.754)	353.325.814
<b>Saldo Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya akhir periode</b>	<b>(156.247.754)</b>	<b>367.565.470</b>

**PT JAMKRIDA JABAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

**17. LIABILITAS JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**Program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya**

Program Imbalan Kerja jangka Panjang Lainnya berdasarkan Peraturan Perusahaan yang mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya dalam bentuk cuti besar.

Perusahaan memberikan 2 (dua) bulan cuti panjang bagi karyawan yang masih aktif selama 6 (enam) tahun masa kerja dan kelipatannya yang akan diberikan di tahun ke 7 (tujuh) dan ke 8 (delapan), masing-masing selama 1 (satu) bulan.

**a. Rekonsiliasi NKKIP dan Nilai Wajar Aset Program atas Aset dan Kewajiban**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	263.941.538	-
Nilai wajar Aset	-	-
<b>Status Pendanaan</b>	263.941.538	-
Jumlah lain yang diakui	-	-
<b>Kewajiban diakui di laporan posisi keuangan</b>	<b>263.941.538</b>	<b>-</b>

**b. Mutasi Kewajiban dan Aset yang Diakui di Laporan Posisi Keuangan**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Kewajiban awal periode	<b>227.505.993</b>	-
Beban yang diakui di laba/rugi	36.435.545	-
<b>Kewajiban akhir periode</b>	<b>263.941.538</b>	<b>-</b>

**c. Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Biaya jasa kini	63.419.664	-
Biaya bunga	16.226.374	-
Pengukuran kembali aset imbalan pasti neto	(43.210.493)	-
<b>Jumlah Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi</b>	<b>36.435.545</b>	<b>-</b>

**Asumsi utama yang digunakan sebagai berikut:**

Dalam mengestimasi manfaat pensiun per 31 Desember 2018 dan 2017 untuk kedua program tersebut di atas, Aktuaris dalam perhitungannya menggunakan *Projected Unit Credit Actuarial Cost Method*, yang perhitungannya mengacu kepada tingkat pembiayaan yang sebenarnya diperlukan dalam satu periode. Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Tingkat Diskonto	8,5%	7,5%
Kenaikan Gaji per Tahun	6%	6%
Tabel Mortalita	100% TMI III	100% TMI III
Tingkat Cacat	5% TMI III	5% TMI III
Usia Pensiun Normal	58 tahun	58 tahun

**18. PERPAJAKAN**

**a. Utang Pajak**

Utang Pajak per 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
PPh 4 ayat 2	85.841.537	106.651.484
PPh Pasal 21	188.318.566	92.177.465
PPh Pasal 23	1.200.809	4.395.079
<b>Jumlah Utang Pajak</b>	<b>275.360.912</b>	<b>203.224.028</b>

Utang pajak PPh Pasal 21 adalah utang pajak atas pajak pendapatan karyawan pada 31 Desember 2018 yang menjadi tanggungan perusahaan dan pajak atas pendapatan Direksi dan Komisaris yang dipotong oleh perusahaan. Utang pajak Pasal 23 adalah utang pajak dikarenakan pihak perusahaan sebagai pemotong pajak atas kegiatan yang diatur dalam PPh pasal 23 tersebut.



**PT JAMKRIDA JABAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

**18. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**b. Beban Pajak**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>831.732.108</b>	<b>5.347.779.170</b>
<b>Perbedaan Temporer:</b>		
Perbedaan Penyusutan antara Fiskal dan Komersil	(723.197.716)	(760.890.721)
Kenaikan Cadangan Klaim	(265.769.987)	(1.414.447.305)
Kenaikan Imbalan Purna Jabatan	-	(904.000.000)
Pembayaran Manfaat IPK	-	(114.960.000)
Beban Imbalan Pasca Kerja	558.893.962	757.638.355
<b>Jumlah</b>	<b>(430.073.741)</b>	<b>(2.436.659.671)</b>

**b. Beban Pajak (lanjutan)**

<b>Perbedaan Permanen:</b>		
Beban Promosi	672.166.902	523.915.772
Beban Perjalanan Dinas	556.896.594	442.655.504
Beban Diklat Karyawan	256.713.640	186.008.888
Pemeliharaan Kendaraan	220.838.751	151.426.906
Beban Representasi	231.954.683	220.481.592
Tunjangan Kesehatan	416.349.004	370.903.344
Tunjangan Baju	106.620.488	81.549.380
Denda Pajak	5.877.708	-
Beban Umum Lainnya	220.637.033	274.282.729
<b>Jumlah</b>	<b>2.688.054.803</b>	<b>2.251.224.115</b>

**Pendapatan yang Dikenakan PPh Final:**

Pendapatan Deposito	(10.217.983.392)	(11.910.943.750)
Pendapatan Obligasi	(3.025.877.290)	(1.638.517.668)
Pendapatan Jasa Giro	(115.717.934)	(133.447.412)
PPh Pasal 4 (2) Bunga Deposito	2.044.901.338	-
PPh Pasal 4 (2) Kupon Obligasi	375.770.625	-
PPh Pasal 4 (2) Bunga Jasa Giro	22.482.079	-
<b>Jumlah</b>	<b>(10.916.424.574)</b>	<b>(13.682.908.830)</b>

**Jumlah koreksi fiskal**

**(8.658.443.511) (13.868.344.386)**

**Rugi Fiskal Tahun Berjalan**

**(7.826.711.403) (8.520.565.216)**

**Rugi (dibulatkan)**

**(7.826.711.000) (8.520.565.000)**

Kerugian Pajak Tahun 2013	-	(5.232.957.000)
Kerugian Pajak Tahun 2014	(3.885.454.000)	(3.885.454.000)
Kerugian Pajak Tahun 2015	(2.599.512.000)	(2.599.512.000)
Kerugian Pajak Tahun 2016	(1.773.305.000)	(1.773.305.000)
Kerugian Pajak Tahun 2017	(8.520.565.000)	-
<b>Rugi Fiskal yang dapat Dikompensasi</b>	<b>(24.605.547.000)</b>	<b>(22.011.793.000)</b>

**c. Beban Pajak Penghasilan**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>		
Pajak Final	-	2.658.014.948
25% x Penghasilan Kena Pajak	-	-
<b>PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**PT JAMKRIDA JABAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

**18. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**d. Pajak Tangguhan**

<b>2018</b>				
	<b>1 Jan 2018</b>	<b>Laporan Perubahan Ekuitas</b>	<b>Laporan Laba Rugi</b>	<b>31 Des 2018</b>
Selisih penyusutan aset tetap	(190.222.680)	-	(180.799.429)	(371.022.109)
Cadangan klaim	864.452.335	-	(66.442.497)	798.009.839
Beban Imbal Pasca Kerja	216.045.247	(39.061.939)	100.661.552	277.644.861
Kerugian Fiskal yang dapat dikompensasi	5.502.948.500	-	648.438.500	6.151.387.000
<b>Jumlah</b>	<b>6.393.223.402</b>	<b>(39.061.939)</b>	<b>501.858.126</b>	<b>6.856.019.590</b>

<b>2017</b>				
	<b>1 Jan 2017</b>	<b>Laporan Perubahan Ekuitas</b>	<b>Laporan Laba Rugi</b>	<b>31 Des 2017</b>
Selisih penyusutan aset tetap	(174.852.006)	-	(15.370.674)	(190.222.680)
Cadangan klaim	1.218.064.161	-	(353.611.827)	864.452.335
Beban Imbal Pasca Kerja	55.375.659	88.331.454	72.338.135	216.045.247
Cadangan Purna Jabatan	226.000.000	-	(226.000.000)	-
Kerugian Fiskal yang dapat dikompensasi	3.564.314.750	-	1.938.633.750	5.502.948.500
<b>Jumlah</b>	<b>4.888.902.564</b>	<b>88.331.454</b>	<b>1.415.989.384</b>	<b>6.393.223.402</b>

**19. EKUITAS**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Penyertaan Modal	153.200.000.000	153.200.000.000
Cadangan Umum	3.761.254.327	2.734.815.926
Saldo Laba	1.333.590.236	4.105.753.606
Selisih Nilai Wajar Obligasi	(66.000.000)	-
Keuntungan pengukuran kembali	(143.662.529)	(260.848.345)
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>158.085.182.034</b>	<b>159.779.721.187</b>

Berdasarkan akta notaris Yulianti Idawati, S.H., Sp.N, No. 3 tanggal 3 Oktober 2012, modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp 300.000.000.000 dari 30.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000.000, dan berdasarkan akta No. 60 tanggal 26 Desember 2012 dari notaris yang sama tentang keputusan para pemegang saham diluar rapat perseroan terbatas PT Jamkrida Jabar (keputusan sirkuler) memutuskan:

- I. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil bagian 145.000 (seratus empat puluh lima ribu) lembar saham atau sebesar Rp 145.000.000.000 dengan dua tahap penyetoran yaitu:
  - a. Tahap pertama sebelum penandatanganan akta sebesar Rp 25.000.000.000.
  - b. Tahap kedua sesudah penandatanganan akta sebesar Rp 75.000.000.000.
  - c. Tahap ketiga sesudah penandatanganan akta sebesar Rp 45.000.000.000.
- II. Yakes Pegawai Bank BJB mengambil bagian 20 (dua puluh) lembar saham atau sebesar Rp 200.000.000.

Setoran modal tahap pertama dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 937/1864/PM/LS/KEU tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp25.000.000.000 dan setoran modal dari Yayasan Kesehatan Pegawai Bank BJB pada tanggal 1 Nopember 2012 sebesar Rp200.000.000, kedua setoran modal dari para pemegang saham tersebut diterima pada Bank BJB No. rekening 00228688871001 atas nama PT Jamkrida Jabar.

PT Jamkrida Jabar telah menerima setoran modal tahap ke dua dari Pemerintah Provinsi Jabar sebesar Rp 50.000.000.000 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/53/PM/LS/2013 tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp 50.000.000.000, Pada tanggal 27 November 2013 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/2041/PM/LS/2013 terdapat penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 25.000.000.000,-.

PT Jamkrida Jabar telah menerima setoran modal tahap ke tiga dari Pemerintah Provinsi Jabar sebesar Rp 45.000.000.000,- pada tanggal 10 Desember 2015.

**PT JAMKRIDA JABAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

**19. EKUITAS (lanjutan)**

Berdasarkan akta No. 11 tanggal 16 Agustus 2017 dari notaris yang sama tentang keputusan para pemegang saham diluar rapat perseroan terbatas PT Jamkrida Jabar (keputusan sirkuler) memutuskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil bagian 8.000 lembar saham atau sebesar Rp 8.000.000.000. Komposisi modal ditempatkan dan disetor PT Jamkrida Jabar per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham (Lembar)	Nominal (Rp)	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	15.300	10.000.000	153.000.000.000	99,87%
YKP Bank BJB	20	10.000.000	200.000.000	0,13%
<b>Jumlah</b>	<b>15.320</b>	<b>20.000.000</b>	<b>153.200.000.000</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jamkrida Jabar Nomor 05 tanggal 09 Mei 2018 yang dibuat oleh notaris Mohamad Juanita, SH., M.kn., para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan Penggunaan Laba Bersih tahun 2017 sebesar Rp 4.105.753.606, dibagi untuk Cadangan Umum sebesar 25%, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebesar 2%, Dividen sebesar 51,10%, Tantiem dan Bonus sebesar 21,90%.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jamkrida Jabar Nomor 28 tanggal 28 April 2017 yang dibuat oleh notaris Rita Evriyani, SH, para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan Penggunaan Laba Bersih tahun 2016 sebesar Rp 5.420.737.408, dibagi untuk Cadangan Umum sebesar 25%, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebesar 2%, Dividen sebesar 51,10%, Tantiem dan Bonus sebesar 21,90%.

**Analisis Gearing Ratio**

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, *Gearing Ratio* adalah batasan yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan penjamin dalam melakukan kegiatan penjaminan.

*Gearing Ratio* merupakan perbandingan antara total nilai *outstanding* penjaminan yang ditanggung sendiri dengan modal sendiri bersih penjamin pada waktu tertentu. Modal sendiri bersih terdiri dari penempatan modal pemerintah, cadangan-cadangan, saldo laba, dan komponen ekuitas lainnya dikurangi kerugian.

$$\begin{aligned} \text{GR Produktif} &= \frac{1.222.649.117.985}{158.085.182.034} = 7,73 \times \\ \text{Total GR} &= \frac{3.109.192.339.625}{158.085.182.034} = 19,67 \times \end{aligned}$$

Gearing Ratio PT Jamkrida Jabar per 31 Desember 2018 untuk yang produktif sebesar 7,73 x dan secara total sebesar 19,67 x.

**20. PENDAPATAN PENJAMINAN**

Imbal jasa penjaminan per 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari:

	2018	2017
Imbal Jasa Penjaminan/Kafalah	41.301.947.325	30.928.168.179
Beban <i>Fee Based Income</i> Bank	(55.858.210)	(61.781.599)
Beban Komisi Agen	(5.358.825.486)	(3.732.520.703)
Restitusi IJP	(1.434.279.301)	(864.443.212)
<i>Management Fee</i>	744.034.313	1.399.996.300
<b>Jumlah Jasa Penjaminan Kredit</b>	<b>35.197.018.641</b>	<b>27.669.418.965</b>

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK) adalah premi yang diterima oleh Perusahaan dari terjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan. Besarnya IJP dan IJK dihitung dari tarif IJP dan IJK, plafond kredit/pembiayaan dan jangka waktu kredit/pembiayaan.

**PT JAMKRIDA JABAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

**20. PENDAPATAN PENJAMINAN (lanjutan)**

Untuk kredit eksisting, besarnya tarif IJP ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain: produk penjaminan, risiko yang dijamin dan jangka waktu penjaminan.

Biaya komisi agen sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pada Nomor: 6/ POJK.05/2014 BAB II Pasal 4 (6) adalah maksimal sebesar 20% dari nilai Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK). Tarif biaya komisi agen dan *fee based income* bank yang berlaku di PT Jamkrida Jabar adalah sebesar 15% dan dibebankan selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan tahun terbit Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK) dengan batas waktu maksimal 4 tahun.

Mulai November 2016 pengakuan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income*, biaya komisi agen dan beban Re/Cogaransi diakui sesuai jangka waktu kredit.

**21. PENDAPATAN INVESTASI**

Pendapatan investasi per 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari:

	2018	2017
Pendapatan Bunga Deposito Bruto	8.895.981.486	10.782.939.535
Pendapatan Bagi Hasil Deposito Bruto	1.322.001.906	1.128.004.215
Pendapatan Kupon Obligasi Bruto	3.025.877.290	1.638.517.668
Pendapatan Amortisasi Diskonto	115.717.934	75.989.282
<b>Jumlah Pendapatan Investasi</b>	<b>13.359.578.616</b>	<b>13.625.450.700</b>

**22. BEBAN KLAIM**

Beban klaim per 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari:

	2018	2017
Beban Klaim	22.490.345.113	14.274.790.505
Pemulihan Cadangan Klaim	(265.769.987)	(1.414.447.305)
Beban Re/Cogaransi	11.580.809.268	9.770.245.974
<b>Jumlah Beban Klaim</b>	<b>33.805.384.394</b>	<b>22.630.589.174</b>

**23. BEBAN USAHA**

Beban usaha per 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari:

	2018	2017
Beban Operasional	1.580.905.049	1.196.315.041
Beban Sumber Daya Manusia	11.074.805.430	9.738.935.138
Beban Administrasi Kantor dan Umum	2.846.274.500	3.359.775.033
<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<b>15.501.984.979</b>	<b>14.295.025.212</b>

**Rincian Beban Operasional adalah:**

	2018	2017
Beban Promosi	672.166.902	523.915.772
Beban Perjalanan Dinas	556.896.594	442.655.504
Beban Kendaraan Dinas	308.320.883	229.743.765
Beban Penagihan Subrogasi	43.520.670	-
<b>Jumlah Beban Operasional</b>	<b>1.580.905.049</b>	<b>1.196.315.041</b>

**Rincian Beban Sumber Daya Manusia**

	2018	2017
Gaji dan Tunjangan Komisaris	483.000.000	483.000.000
Gaji dan Tunjangan Dewan Pengawas Syariah	84.000.000	85.000.000
Gaji dan Tunjangan Direksi	2.250.000.000	2.250.000.000
Gaji dan Tunjangan Karyawan	4.639.545.918	4.266.788.596
Beban Imbal Pasca Kerja	558.893.962	59.765.820
Beban PPH 21	1.129.154.480	1.019.935.512
Beban Purna Jabatan	553.500.000	553.500.000
Beban Insentif	998.079.159	728.198.920
Beban Pengembangan SDM	260.867.140	192.905.008
Tunjangan SDM Lainnya	117.764.771	99.841.282
<b>Jumlah Beban Sumber Daya Manusia</b>	<b>11.074.805.430</b>	<b>9.738.935.138</b>

**PT JAMKRIDA JABAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

**24. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM**

**Rincian Beban Administrasi Kantor dan Umum**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Beban Administrasi	250.170.684	713.816.193
Beban Sewa	112.598.276	66.619.348
Beban Komunikasi & Energi	278.161.327	235.884.332
Beban Penyusutan & Amortisasi Aset	904.463.777	969.126.754
Beban Pemeliharaan & Asuransi Aset	454.217.534	448.043.448
Beban Pajak - Pajak	17.268.201	2.983.719
Beban Umum	829.394.701	923.301.239
<b>Jumlah Beban Administrasi Kantor dan Umum</b>	<b>2.846.274.500</b>	<b>3.359.775.033</b>

**25. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN**

Akun ini terdiri dari:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Pendapatan Lain-lain</b>		
Pendapatan Jasa Giro	112.282.746	133.447.412
Pendapatan Subrogasi	3.231.634.226	831.830.265
Pendapatan Lainnya	681.741.295	13.246.214
<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain</b>	<b>4.025.658.267</b>	<b>978.523.891</b>
<b>Biaya Lain-lain</b>		
- PPh Pasal 4 (2) Bunga Deposito	(2.044.901.338)	(2.382.194.463)
- PPh Pasal 4 (2) Kupon Obligasi	(375.770.625)	(248.976.287)
- PPh Pasal 4 (2) Bunga Jasa Giro	(22.482.079)	(26.844.198)
<b>Jumlah Beban Lain-lain</b>	<b>(2.443.154.042)</b>	<b>(2.658.014.948)</b>
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain</b>	<b>1.582.504.224</b>	<b>(1.679.491.057)</b>

**26. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, dimana manajemen berpendapat transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga, yang meliputi:

<b>Pihak Berelasi</b>	<b>Sifat Hubungan</b>	<b>Sifat Dari Transaksi</b>
Bank BJB	Pengendalian bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Giro, deposito dan penampungan sementara
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pemegang saham	Penyertaan Saham
YKP Bank BJB	Pemegang saham	Penyertaan Saham

**27. INFORMASI TAMBAHAN**

**a. Kerja sama dengan perusahaan Asuransi**

PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah bekerja sama dengan pihak asuransi untuk melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan kredit multiguna/pembiayaan murabahah/mudharabah bagi penerima kredit/pembiayaan, kerugian yang ditanggung adalah kerugian akibat risiko kematian.

PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah telah melakukan perjanjian kerja sama dengan:

- Bank BJB Syariah
- BPRS HIK Parahyangan
- BPRS Al Masoem
- BPRS Patriot Kota Bekasi
- BPRS Al Madinah Kota Tasikmalaya

**b. Jenis-Jenis Produk Penjaminan Syariah**

- Kafalah Pembiayaan Umum
- Kafalah Pembiayaan Multiguna
- Kafalah Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa
- Kafalah Pembiayaan Mikro
- Kafalah Pembiayaan Kepada BPRS
- Kafalah Kontra Bank Garansi



**PT JAMKRIDA JABAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

**27. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)**

**c. Laporan Laba (Rugi) Syariah Tahun 2018 dan 2017**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Pendapatan Penjaminan</b>		
Imbal Jasa Kafalah	3.895.521.252	2.090.253.031
Beban Fee Based Income Bank	(17.959.833)	(10.664.794)
Beban Komisi Agen	(603.185.661)	(313.489.234)
Manajemen Fee	114.519.430	79.167.227
Restitusi IJP	(530.261)	(129.074)
<b>Jumlah Pendapatan Penjaminan</b>	<b>3.388.364.927</b>	<b>1.845.137.156</b>
<b>Beban Klaim</b>		
Beban Klaim	(1.896.162.904)	(1.329.935.309)
Pemulihan Cadangan Klaim	209.487.813	39.311.071
Beban Re/Cogaransi	(1.606.593.872)	(651.693.030)
<b>Jumlah Beban Klaim</b>	<b>(3.293.268.963)</b>	<b>(1.942.317.268)</b>
<b>Pendapatan Penjaminan Bersih</b>	<b>95.095.964</b>	<b>(97.180.112)</b>
Pendapatan Investasi	1.728.727.457	1.417.013.860
Pendapatan (Beban) Non Operasional	(178.728.638)	(117.626.648)
Beban Usaha	(998.741.168)	(1.107.640.042)
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>646.353.615</b>	<b>94.567.058</b>
Beban Pajak Kini	-	-
Manfaat Pajak Tangguhan	131.841.377	217.526.086
<b>Laba Bersih Unit Syariah</b>	<b>778.194.992</b>	<b>312.093.144</b>

**28. MANAJEMEN RISIKO**

Untuk Penerapan Manajemen Risiko di PT Jamkrida Jabar saat ini masih dalam proses penyusunan mengingat termasuk ke dalam 11 pedoman yang termuat dalam *Good Corporate Governance* (GCG) PT Jamkrida Jabar. Adapun dalam pedoman Penerapan Manajemen Risiko dimaksud ditetapkan 7 risiko yang menjadi parameter penilaian risiko yang dihadapi perusahaan yaitu risiko:

1. Risiko Strategi
2. Risiko Operasional
3. Risiko Aset dan Liabilitas
4. Risiko Kepengurusan
5. Risiko Tata Kelola
6. Risiko Dukungan Dana (Permodalan)
7. Risiko Penjaminan

Kegiatan Manajemen Risiko PT Jamkrida Jabar yang dilakukan saat ini masih bersifat periodik dan insidental. Dimana secara periodik khususnya dalam laporan bulanan maupun triwulan ditampilkan *profile risk* setiap skim kredit yang dijamin serta mitra bisnis sehingga dapat dijadikan tolak ukur serta pengambilan keputusan manakala *profile risk* menunjukan indikasi kerugian bagi perusahaan kedepannya. Untuk penerapan manajemen risiko secara insidental dalam bentuk kajian manajemen risiko terkait penilaian kegiatan yang akan ditempuh oleh perusahaan (kajian mitra usaha dalam rangka kerjasama baru atau produk baru, penempatan deposito, obligasi dll). Hasil dari analisa dan penilaian risiko tersebut akan dibahas rapat Manajemen PT Jamkrida Jabar untuk menentukan mitigasi risiko yang akan dilakukan.

Secara umum risiko yang dihadapi PT. Jamkrida Jabar dapat digolongkan kedalam empat risiko yaitu: risiko operasional, Risiko Keuangan, Risiko Manajemen (Re/Cogaransi/Co garansi) dan Risiko Pasar (bisnis).

**1. Risiko Operasional**

Risiko Operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam merealisasikan kewajiban kepada penerima jaminan sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi, dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan Perusahaan.

Sumber Risiko Operasional adalah struktur organisasi, SDM, volume dan beban kerja yang dimiliki, tingkat kompleksitas Perusahaan yang tinggi, sistem dan teknologi informasi tidak memadai, Perusahaan memiliki kecurangan dan permasalahan hukum, adanya gangguan terhadap bisnis Perusahaan.

Risiko Operasional dapat meningkat antara lain karena adanya serangan *hacker* terhadap sistem teknologi Perusahaan dan pengunduran diri pegawai kunci secara mendadak sehingga mengakibatkan tidak berjalannya organisasi.

Pada tahun 2018 terdapat 1 (satu) indikator risiko operasional yang membaik dan 3 (tiga) indikator risiko operasional yang menurun. indikator yang membaik adalah tingkat pencapaian pengembalian subrogasi yang mengalami peningkatan dari tahun 2017. Sedangkan indikator operasional yang menurun adalah Default Risk, Recovery Rate Piutang Subrogasi dan NPL.

**28. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**1. Risiko Operasional (lanjutan)**

Uraian	2018	2017
Default risk = $(\text{Biaya Klaim})/(\text{Volume Penjaminan})$	1,28%	0,81%
NPL = $(\text{Outstanding Kredit Kol 3+4+5})/(\text{Total Outstanding Kredit})$	3,60%	2,37%
Tingkat Pencapaian Pengembalian Subrogasi = $(\text{Realisasi Angsuran Subrogasi})/(\text{Target Angsuran Subrogasi})$	259%	118%
Recovery Rate Piutang Subrogasi = $(\text{Angsuran Piutang Subrogasi})/(\text{Saldo Piutang Subrogasi})$	21%	38%

Untuk meminimalkan risiko operasional, maka pada proses penjaminan kredit dilakukan identifikasi risiko menggunakan 4P, yaitu Prospect, Productivity, Payment, dan Personality. Item yang harus diperhatikan untuk masing-masing aspek tersebut disesuaikan dengan karakteristik kredit yang akan dijamin, dan dijabarkan di dalam sistem dan prosedur penjaminan yang terkait.

Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan apakah suatu pengajuan penjaminan dapat disetujui atau tidak, dilakukan dalam sebuah rapat komite. Sesuai prinsip kehati-hatian, maka anggota komite tersebut terdiri dari unit yang terkait secara langsung dengan kegiatan penjaminan (Direktur Operasional, Kadiv Penjaminan, Kabag dan Staf terkait) dan unit yang terkait langsung dengan konsekuensi biaya atas potensi risiko. Dengan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan dua pihak atau lebih dari sisi yang berlainan tersebut, maka diharapkan keputusan menjadi lebih obyektif dan potensi risiko karena kesalahan pengambilan keputusan dapat diminimalisasi.

Selain digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan penjaminan, hasil pembahasan risiko yang telah dilakukan juga dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam melakukan pemantauan terhadap kredit yang sedang berjalan. Untuk kredit yang berisiko tinggi, maka pemantauan terhadap kredit dilakukan secara lebih intensif.

Pada tahun 2018, di samping upaya mitigasi tersebut, perusahaan juga melakukan beberapa mitigasi risiko lainnya yaitu:

- Melakukan pembaharuan perjanjian kerjasama dengan menambahkan klausula yang dapat digunakan untuk meminimalkan risiko.
- Melakukan penyebaran risiko dengan menempatkan sebagian risiko (Re/Cogaransi) ke 2 (dua) perusahaan reasuransi yaitu NasRe dan ReINDO.
- Melakukan co-guarantee dengan Perusahaan Penjaminan lainnya untuk meminimalkan risiko Penjaminan.
- Melakukan updating data piutang subrogasi termasuk agunan sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan upaya penagihan piutang subrogasi agar upaya tersebut dapat dilakukan secara efektif, baik langsung maupun melalui agen dalam hal penagihan.
- Mengoptimalkan penagihan piutang subrogasi.
- Menerapkan metode *Stoploss* khusus untuk skim kredit yang dianggap risikonya tinggi.

**2. Risiko Co-Guarantee / Re-Guarantee**

Co-guarantee adalah kerjasama antara PT Jamkrida Jabar dengan perusahaan penjaminan lain dalam hal ini adalah PT Jamkrida Banten dalam bentuk penutupan risiko tertentu, sedangkan Re-guarantee adalah bentuk kerjasama antara PT. Jamkrida Jabar dengan perusahaan reasuransi baik secara langsung maupun melalui pialang reasuransi (Broker Re). Untuk kerjasama Re-guarantee PT. Jamkrida Jabar menggunakan jasa pialang reasuransi yaitu PT. Best One Asia Reinsurance Brokers dan PT. Jakarta Raya Pialang Insurance. Selanjutnya PT. Jamkrida Jabar akan bekerjasama dengan minimal 2 broker dalam rangka penyebaran risiko melalui Re-guarantee / Co-guarantee.

Salah satu indikasi besaran risiko co-guarantee/re-guarantee adalah besarnya piutang co-guarantee/re-guarantee dibandingkan dengan rata-rata pengajuan klaim co-guarantee/re-guarantee dengan mitra co-guarantee/re-guarantee yang terkait. Mengingat PT. Jamkrida Jabar menggunakan metode kompensasi (*Offset*) terhadap pengajuan klaim dengan pendapatan IJP porsi co-guarantee/re-guarantee, sehingga piutang co-guarantee/re-guarantee akan menjadi nol pada bulan berikutnya ketika PT. Jamkrida Jabar melakukan kompensasi.

**28. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**2. Risiko Co-Guarantee / Re-Guarantee (lanjutan)**

<i>Mitra Co-Guarantee/ Re-Guarantee</i>	<i>Saldo Piutang Co Guarantee/Re-Guarantee</i>	<i>Rata-rata Pengajuan Klaim Co-Guarantee /Re-Guarantee per Bulan</i>
PT Jamkrida Banten	219.187.869	157.703.081
PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi	118.815.571	106.292.011
PT. Best One Asia Reinsurance Brokers	7.662.288.759	2.833.696.011

Untuk meminimalkan risiko *Co-guarantee/Re-guarantee*, perusahaan melakukan mitigasi dengan:

- Melakukan evaluasi kinerja mitra *Co-guarantee/Re-guarantee* secara berkala untuk meminimalisir risiko.
- Melakukan penyempurnaan perjanjian dengan menambahkan klausula untuk meminimalkan risiko.
- Melakukan pencatatan *loss ratio* untuk memetakan besaran risiko yang akan ditransfer ke mitra *Co-guarantee/Re-guarantee*.
- Menjamin ulang kepada perusahaan penjamin ulang /reass yang bonafit dan terpercaya.

**3. Risiko Keuangan**

Risiko Keuangan dapat tercermin salah satunya dari risiko likuiditas suatu perusahaan. Risiko Likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.

Rasio likuiditas penjamin ditetapkan paling sedikit 150% (seratus lima puluh per seratus). Rasio Likuiditas dihitung dengan menggunakan *current ratio* yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar.

<b>Uraian</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Risiko Likuiditas = (aset lancar)/(utang lancar)	4102,93%	9322,63%

Berdasarkan indikator tersebut, maka risiko likuiditas PT Jamkrida Jabar relatif kecil.

**4. Risiko Pasar**

Risiko Pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar penjaminan PT. Jamkrida Jabar, yang dapat mengurangi pasar penjaminan Perusahaan serta pergerakan pasar keuangan yang dapat berpotensi menurunkan return dan nilai investasi. Variabel pasar dalam hal ini yang terkait penjaminan adalah tingkat kompetisi, trend kredit perbankan, regulasi pasar. Risiko pasar yang terkait dengan investasi adalah suku bunga, inflasi, dan portofolio investasi.

<b>Uraian</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Pertumbuhan Penjaminan = ((Vol Penjaminan t-Vol Penjaminan t-1))/(Vol Penjaminan t-1)	13,37%	25,74%
Pencapaian Target Penjaminan = (Realisasi Vol Penjaminan)/(Target Vol Penjaminan)	62%	96%
Pencapaian Pendapatan Investasi = (Realisasi Pendapatan Investasi)/ (Target Pendapatan Investasi)	116%	125%

Dari beberapa indikator tersebut di atas, dapat dilihat pertumbuhan penjaminan dan pencapaian target penjaminan mengalami penurunan. Sedangkan untuk pencapaian pendapatan investasi dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan tetapi secara target tercapai.

---

**28. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

---

**4. Risiko Pasar (lanjutan)**

Dari beberapa indikator tersebut di atas, dapat dilihat pertumbuhan penjaminan dan pencapaian target penjaminan mengalami penurunan. Sedangkan untuk pencapaian pendapatan investasi dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan tetapi secara target tercapai.

Secara nominal, pendapatan investasi Perusahaan mengalami penurunan, namun target yang ditetapkan dalam RKAP 2018 tercapai. Namun demikian dalam jangka panjang Perusahaan perlu mewaspadai risiko tidak tercapainya target pendapatan investasi mengingat suku bunga perbankan semakin menurun.

Untuk meminimalkan risiko investasi berupa deposito, hal-hal yang dilakukan perusahaan adalah:

- Melakukan pemilihan bank untuk penempatan deposito, dimana deposito ditempatkan di bank-bank yang berkinerja baik, dengan tetap mempertimbangkan resiprokal (adanya kerjasama penjaminan).
- Nominal penempatan disesuaikan dengan ekuitas bank yang bersangkutan serta ketentuan maksimal LPS.
- Penempatan dilakukan dengan jangka waktu tertentu yang memungkinkan dilakukan review apabila terjadi perubahan tingkat suku bunga.
- Penyebaran investasi ke beberapa BPR yang sehat dengan tetap mengedepankan tingkat kehati-hatian, resiprokal dan ketentuan maksimal LPS.
- Penempatan investasi dalam bentuk Obligasi yang tepat dan menguntungkan.

---

**29. REKLASIFIKASI AKUN PADA LAPORAN KEUANGAN**

---

Akun pada laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah di reklasifikasi dalam rangka penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

<b>Akun pada Laporan Laba Rugi Komprehensif</b>	<b>Sebelum Reklasifikasi</b>	<b>Sesudah Reklasifikasi</b>	<b>Selisih</b>
Pendapatan (Beban) Lain-lain	978.523.891	(1.679.491.057)	2.658.014.948
Beban Pajak Kini	(2.658.014.948)	-	(2.658.014.948)

---

**30. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

---

Direksi bertanggung jawab sepenuhnya atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Laporan keuangan diterbitkan pada tanggal 04 April 2019.

---

**31. PERNYATAAN KEPATUHAN**

---

Laporan keuangan perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 disusun oleh Direksi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.



**PT. JAMKRIDA JABAR**  
*SOLUSI KUMKM MASYARAKAT JAWA BARAT*